

ABSTRAK

ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGUNAAN SUMBER DAYA AIR TANPA PERIZINAN BERUSAHA UNTUK KEBUTUHAN USAHA TAMBAK (Studi Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2023/PN.Tjk)

Oleh

Irvan Berlian Aris WD

Penggunaan sumber daya air tanpa perizinan berusaha untuk kebutuhan usaha tambak merupakan salah satu jenis tindak pidana yang diatur dalam Pasal 73 huruf b Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana penggunaan sumber daya air tanpa perizinan berusaha untuk kebutuhan usaha tambak berdasarkan Putusan Nomor: 255/Pid.Sus/2023/PN.Tjk dan meninjau apakah putusan tersebut telah sesuai dengan keadilan substantif.

Metode penelitian menggunakan yuridis normatif dan yuridis empiris, mengacu pada sumber data primer yang dikumpulkan melalui studi lapangan dan sekunder melalui studi pustaka untuk selanjutnya di analisis secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan, pertama, dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan Putusan Nomor: 255/Pid.Sus/2023/PN.Tjk terdiri dari pertimbangan yuridis, sosiologis dan filosofis. Secara yuridis, perbuatan terdakwa memenuhi unsur Pasal 73 huruf b Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air *jo* Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Secara sosiologis, hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dalam penjatuhan pidana. Secara filosofis hakim menilai bahwa pembedaan tidak hanya bertujuan untuk menimbulkan efek jera tetapi sebagai upaya pembedaan terhadap terdakwa. Kedua, putusan hakim tersebut belum mencerminkan keadilan substantif karena hakim kurang mempertimbangkan aspek kerugian moral yang dirasakan masyarakat akibat perbuatan terdakwa dan belum optimalnya sanksi yang dijatuhkan untuk memberikan efek jera.

Irvan Berlian Aris WD

Saran dari penelitian ini, pertama, apabila kedepan hakim mengadili perkara yang serupa dengan Putusan Nomor: 255/Pid.Sus/2023/PN.Tjk, maka disarankan untuk menjatuhkan pidana secara tepat, sehingga dapat memberikan efek jera secara optimal dan meminimalisir terjadinya kasus serupa oleh pengusaha lainnya. Kedua, pemenuhan keadilan substantif bagi masyarakat yang menjadi korban menjadi aspek penting yang harus lebih dipertimbangkan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara yang serupa dengan Putusan Nomor: 255/Pid.Sus/2023/PN.Tjk.

Kata Kunci: Putusan Hakim, Tindak Pidana, Penggunaan Sumber Daya Air

ABSTRACT

ANALYSIS OF JUDICIAL DECISIONS AGAINST PERPETRATORS OF CRIMINAL OFFENSES FOR THE UNAUTHORIZED USE OF WATER RESOURCES FOR THE PURPOSE OF FISH FARMING (Study of Decision Number 255/Pid.Sus/2023/PN.Tjk)

**By
Irvan Berlian Aris WD**

The unauthorized use of water resources for the purposes of a shrimp farm business is one of the types of criminal offenses regulated under Article 73(b) of Law No. 17 of 2019 on Water Resources. This study aims to analyze the basis for the judge's considerations in rendering a decision against the perpetrator of the criminal offense of unauthorized use of water resources without a business license for aquaculture purposes based on Judgment Number: 255/Pid.Sus/2023/PN.Tjk and to assess whether the judgment aligns with substantive justice. The research method employs both normative and empirical legal approaches, referencing primary data collected through field studies and secondary through literature review, which were then analyzed qualitatively. The research results indicate, first, that the judge's basis for issuing Judgment No. 255/Pid.Sus/2023/PN.Tjk consists of legal, sociological, and philosophical considerations.

Legally, the defendant's actions meet the elements of Article 73(b) of Law No. 17 of 2019 on Water Resources in conjunction with Law No. 11 of 2020 on Job Creation. Sociologically, the judge considered aggravating and mitigating factors in imposing the sentence. Philosophically, the judge assessed that criminal punishment is not only intended to deter but also as an effort to punish the defendant. punishment is not only intended to deter but also as an effort to punish the defendant. Second, the judge's decision does not yet reflect substantive justice because the judge did not sufficiently consider the moral harm felt by the community due to the defendant's actions and the inadequacy of the imposed sanctions to achieve a deterrent effect. Third, the judge's decision does not reflect procedural justice because the judge did not adequately consider The recommendations from this study are as follows: first, if in the future judges preside over cases similar to Judgment Number: 255/Pid.Sus/2023/PN.Tjk, it is recommended that they impose appropriate penalties so as to provide an optimal deterrent effect and minimize the occurrence of similar cases by other businesspeople. Second, the fulfillment of substantive justice for the victims is an important aspect that judges should give greater consideration to when rendering decisions on cases similar to Judgment No. 255/Pid.Sus/2023/PN.Tjk.

Keywords: Judicial Decision, Criminal Offense, Use of Water Resources